KEBIJAKAN PEMANGKU KEPENTINGAN

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa tujuan dan operasi perusahaan PT Kereta Api Indonesia selaras dengan harapan dan kebutuhan. Melalui keterlibatan yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan, KAI berkomitmen untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan pemangku kepentingan. Kebijakan ini dibuat agar dapat meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, mengidentifikasi dan mengelola risiko serta peluang, serta meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkomitmen:

1. Mengidentifikasi dan memetakan masyarakat yang terdampak, termasuk kelompok rentan, serta berbagai pemangku kepentingan lokal sebagai bagian dari proses keterlibatan yang inklusif dan bertanggung jawab.
2. Menjamin partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan melalui konsultasi yang transparan dan berkesinambungan, dengan menyediakan wadah yang aman bagi mereka untuk menyampaikan pandangan dan perspektif dari sisi pemangku kepentingan.
3. Merancang strategi keterlibatan pemangku kepentingan yang berkelanjutan, dengan fokus pada adaptasi dan penyesuaian terhadap kebutuhan lokal, serta penguatan hubungan jangka panjang melalui pendekatan yang kolaboratif dan partisipatif.
4. KAI menyediakan saluran komunikasi yang jelas bagi para pemangku kepentingan lokal untuk dapat berkomunikasi menyampaikan keluhan demi memaksimalkan pemahaman bersama.

Ruang lingkup kebijakan ini melibatkan seluruh bagian operasi dan seluruh proses usaha yang KAI lakukan. Kebijakan ini akan dikomunikasikan, didokumentasikan, serta ditinjau secara berkala dan menjadi tanggung jawab setiap pihak yang bekerja atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk memastikan penerapan kebijakan ini sesuai dengan sasaran dan upaya perbaikan secara berkelanjutan.

Bandung, 23 September 2024

DIREKTUR UTAMA

DIDIEK HARTANTYO

NIPP 67430